

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global menuntut pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat mendorong tumbuhnya pengetahuan dan inovasi lokal. Frederick dan McIlroy (1999) menjelaskan bahwa paradigma baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dipimpin oleh pengetahuan, karena proses pembangkitan dan eksploitasi pengetahuan memainkan peran utama dalam mencapai kesejahteraan. Munculnya revolusi industri 4.0 menjadi bukti bahwa pembangunan wilayah di era ini cenderung mengarah pada eksploitasi pengetahuan. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, fleksibilitas, kualitas, dan inovasi (Mudin et al., 2018).

Penciptaan dan pemanfaatan pengetahuan menjadi sumber pertumbuhan serta faktor yang menentukan daya saing suatu perusahaan, wilayah, dan/ atau negara (Kolesnichenko et al., 2019). Konsep pembangunan wilayah yang demikian dikenal dengan *knowledge economy* (ekonomi pengetahuan). Sejalan dengan berkembangnya *knowledge economy*, muncul gagasan tentang *learning region* (pembelajaran wilayah) yang menyatukan dua alur pemikiran yaitu pengetahuan mendasari daya saing dan bahwa wilayah adalah ruang untuk interaksi yang mendukung pengumpulan pengetahuan (Perry, 2014). Sementara Azman et al. (2014) menjelaskan *learning region* sebagai sumber inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang penting, dan merupakan kendaraan untuk menghadapi globalisasi. Selain itu, *learning region* juga diartikan sebagai konsep yang menekankan peran kerjasama dan pengumpulan pembelajaran dalam pengelompokan wilayah dan jejaring untuk mempromosikan inovasi dan daya saing wilayah (Asheim, 2012).

Faktor kunci peningkatan daya saing dalam pembangunan yaitu inovasi (Fiore et al., 2011). Inovasi tidak dapat berjalan secara parsial, penerapan inovasi harus meningkatkan kerjasama antara akademisi, industri, dan kebijakan

(Höglund & Linton, 2018). Menurut (Asheim (2012); Freeman (1995); Komninaki (2015); Metcalfe dan Ramlogan (2008)), *Regional Innovation System* (RIS) atau Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan bentuk kerjasama antara publik dan swasta dengan tujuan dasar untuk pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan terdapat proses inovasi sehingga tercipta teknologi baru. Beberapa definisi tersebut sesuai dengan pemahaman mengenai *knowledge economy* dan *learning region* yang mendasari munculnya konsep sistem inovasi daerah sebagai bentuk penerapan keduanya.

Kebijakan merupakan hal penting untuk membangun SIDa yang berfungsi dengan baik (Tödtling & Trippel, 2005). Selain itu, Tödtling dan Trippel (2005) juga mengilustrasikan pentingnya menambahkan komponen kebijakan sebagai subsistem eksplisit (di samping penciptaan pengetahuan baru dan aplikasi pengetahuan) dalam pendekatan SIDa. Tantangan besar implementasi SIDa adalah sinkronisasi kebijakan terutama dengan kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah (Suroso, 2015). Sementara di Indonesia, setiap kegiatan perencanaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan harus berdasarkan kebijakan yang berlaku. Sehingga semestinya SIDa juga terhubung dengan kebijakan yang ada, terutama dalam perencanaan dan pembangunan wilayah. Ketentuan ini telah tercantum dalam Peraturan Bersama Kemenristek dan Kemendagri No.3 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Sistem inovasi daerah di Indonesia mengakomodasi RPJMN 2015-2019 melalui pendekatan pembangunan berdimensi kewilayahan untuk mengakomodasikan dinamika dan kapasitas daerah dalam perencanaan pembangunan nasional (Taufik, 2005). Sementara Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang perekonomiannya ditopang oleh industri kecil menengah, terdapat 140.939 unit (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2018). Hal ini berdampak pada iklim investasi yang cenderung mengarah ke wilayah Barat melalui Jakarta dan wilayah Timur melalui Surabaya, terbukti dengan tingkat investasi Provinsi Jawa Tengah merupakan terendah (86.777.847,6 juta rupiah) diantara Provinsi Jawa Timur (160.172.720,2 juta rupiah) dan Provinsi DKI Jakarta (123.484.390 juta rupiah) (NSWi, 2018). Kondisi tersebut menyebabkan munculnya tantangan bagi Provinsi Jawa Tengah untuk harus lebih

unggul dalam menerapkan sistem inovasi daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonominya.

Merespon hal tersebut, Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan sistem inovasi di daerahnya. Hal ini berkenaan dengan adanya konteks baru dalam pengembangan wilayah yang menekankan pada peran pemerintah untuk memperhatikan tata kelola sistem inovasi daerah dalam pembangunan ekonomi regional. Terlebih lagi kebijakan merupakan tonggak utama dalam keberhasilan implementasi sistem inovasi daerah (Karlsen & Larrea, 2018). Oleh karena itu, diperlukan adanya tinjauan mengenai bagaimana sistem inovasi daerah diakomodasi dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Perumusan Masalah

Pengembangan kebijakan yang berorientasi pada upaya pengembangan sistem inovasi daerah masih menjadi tantangan besar bagi sebagian besar pemerintah daerah (Karlsen & Larrea, 2018). Kerangka kebijakan adalah salah satu komponen terpenting untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan (Pratama, 2018). Kebijakan pemerintah terutama terkait perencanaan dan pembangunan wilayah seharusnya bisa mengatur dan memberikan regulasi berbagai sektor yang terlibat. Termasuk di dalamnya sistem inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan menerapkan konsep pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Kesulitan penerapan SIDA sering terletak pada tahapan proses inovasi dari penelitian dan pengembangan hingga komersialisasi dalam aktivitas bisnis. Undang-undang harus mampu mengarahkan dan menjaga proses inovasi. Sayangnya, di Indonesia keberadaan hukum yang terkait dengan sistem inovasi tidak terjalin sebagai sistem pendukung (Lakitan, 2013). Urgensi untuk memecahkan masalah hukum dalam sistem inovasi menjadi sangat penting untuk menciptakan ekonomi digital dan industri kreatif.

Begitu pula yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, dengan posisi wilayah yang mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam penerapan sistem inovasi daerahnya membutuhkan kerangka kebijakan yang efektif dan terintegrasi.

Sinkronisasi kebijakan SIDA sudah diupayakan termuat dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayahnya. Ketentuan sinkronisasi ini diatur dalam Pergub Jateng No.65 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat (1). Akan tetapi, kebijakan SIDA di Provinsi Jawa Tengah masih belum melakukan *updating* kebijakan. Penyelenggaraan SIDA Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Pergub No.65 Tahun 2012 yang merujuk pada Perber Menristek dan Mendagri No. 3 dan 36 Tahun 2012 dan UU No. 18 Tahun 2002. Sementara UU No. 18 Tahun 2002 sekarang ini statusnya sudah dicabut dan digantikan dengan UU No. 11 Tahun 2019.

Menanggapi kondisi tersebut, suatu wilayah harus mempunyai kemampuan untuk merespon kebijakan dan regulasi yang ada di atasnya. Seperti halnya dengan SIDA di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah sebagai *stakeholder* pertama yang berkaitan langsung dengan kebijakan seharusnya dapat merespon dengan cepat perubahan-perubahan kebijakan yang ada di level nasional. Hal ini menjadi penting mengingat adanya mobilitas sumber daya manusia yang berdampak pada perubahan tanggungjawab setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam SIDA. Perubahan sumber daya manusia yang menangani SIDA akan berdampak pada implementasi yang kurang berkelanjutan, sedangkan SIDA sendiri merupakan kegiatan yang saling berkaitan dan perlu dijalankan secara utuh sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempunyai kemampuan untuk merespon kebijakan dengan cepat.

Provinsi Jawa Tengah juga mengalami hambatan pelaksanaan SIDA terkait proses inovasi pada tahap penelitian dan pengembangan. Disebutkan dalam roadmap SIDA bahwa kondisi SIDA Jawa Tengah saat ini pengembangan Iptek dan inovasi sampai tataran pedesaan masih belum optimal. Sementara Iptek merupakan sumber daya utama yang dapat diolah menjadi inovasi. Selain itu, kondisi budaya inovasi di Provinsi Jawa Tengah masih terdapat permasalahan yaitu banyaknya penemuan di wilayah ini tetapi jejaring antara penemu dan pengguna masih belum terjalin dengan kuat. Sedangkan dalam kebijakan SIDA sudah dijelaskan bahwa jejaring merupakan salah satu unsur SIDA dan penataannya sudah diatur dalam Pergub No.65 Tahun 2012 Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.

Melalui penguatan kerangka kebijakan dalam sistem inovasi, tantangan global pada kebutuhan inovasi dalam arti yang lebih luas untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Sistem inovasi digunakan secara luas sebagai kerangka kerja untuk desain, implementasi, dan evaluasi kebijakan regional berbasis inovasi di berbagai negara dan wilayah. Sementara masih terdapat beberapa permasalahan kebijakan SIDA di Provinsi Jawa Tengah yang akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahan tersebut jika telah diketahui bagaimana SIDA diakomodasi dalam regulasi atau peraturan perencanaan dan pembangunan wilayahnya. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian ini yaitu: *“Bagaimana sistem inovasi daerah Provinsi Jawa Tengah diakomodasi dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayahnya?”*

1.3 Tujuan dan Sasaran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem inovasi daerah diakomodasi dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Adapun sasaran dari penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi konseptualisasi SIDA dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah di Indonesia.
- b. Menganalisis keselarasan antar kebijakan SIDA dan dengan kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Mengidentifikasi penerjemahan kebijakan SIDA menuju implementasi SIDA di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu ruang lingkup wilayah yang menjadi batasan secara administratif dan ruang lingkup materi yang membatasi lingkup pembahasan sekaligus memuat definisi operasional setiap sasaran penelitian.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian untuk meninjau bagaimana sistem inovasi daerah diakomodasi dalam peraturan perencanaan dan pembangunan wilayah yaitu Provinsi Jawa Tengah. Berada di tengah-tengah Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah mempunyai total luas 3,25 juta Ha.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2011

GAMBAR 1.1
RUANG LINGKUP WILAYAH PENELITIAN

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Berikut merupakan beberapa lingkup materi dalam penelitian ini:

- a. Konseptualisasi sistem inovasi daerah dan penerjemahannya ke dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Secara teoritis, kesesuaian konsep ini didapatkan dari teori *knowledge economy* dan *learning region*. Bentuk penerapan kedua teori tersebut di Indonesia diterjemahkan dalam bentuk sistem inovasi daerah. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, konsep sistem

inovasi daerah mempunyai beberapa terjemahan dengan poin utama yaitu 1) Penguatan peran lembaga 2) Proses pembelajaran 3) Menekankan pentingnya interaksi yang berkelanjutan dalam berbagai proses inovasi, dan 4) Gagasan dengan pendekatan yang menyeluruh terhadap suatu sistem. Beberapa poin yang akan diperdalam pada bagian ini yaitu mengenai konteks dan definisi masing-masing konsep sistem inovasi daerah, proses bagaimana *knowledge economy* dan *learning region* menuju sistem inovasi, dan kebijakan yang digunakan.

- b. Analisis keselarasan antar kebijakan sistem inovasi daerah dan dengan kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu melalui dokumen *roadmap* SIDA dan RPJMD. Menurut Karlsen dan Larrea (2018), pengembangan kebijakan yang berorientasi pada upaya pengembangan sistem inovasi daerah masih menjadi tantangan besar bagi sebagian besar pemerintah daerah. Oleh karena itu, sasaran kedua ini penelitian akan menganalisis keselarasan kebijakan SIDA baik secara vertikal (dengan kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah) maupun horizontal (antar kebijakan SIDA). Keselarasan yang dimaksud yaitu keselarasan yang diidentifikasi dari keterpaduan konten kebijakan yang digunakan, apakah ada kesamaan, perbedaan, atau keterhubungan antar kebijakan yang menunjukkan alur tertentu.
- c. Identifikasi penerjemahan kebijakan menuju implementasi SIDA di Provinsi Jawa Tengah diawali dengan penjelasan konsep penguatan SIDA Provinsi Jawa Tengah termasuk tahapan dari konsep menuju pelaksanaan SIDA. Setelah mengetahui tahapan SIDA, kemudian dilakukan identifikasi karakteristik kebijakan SIDA di Provinsi Jawa Tengah sebagai tindak lanjut hasil keseluruhan analisis pada penelitian ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Berikut ini beberapa penelitian dengan tema yang sama namun ada pembeda yang jelas dari fokus pembahasan yang diteliti:

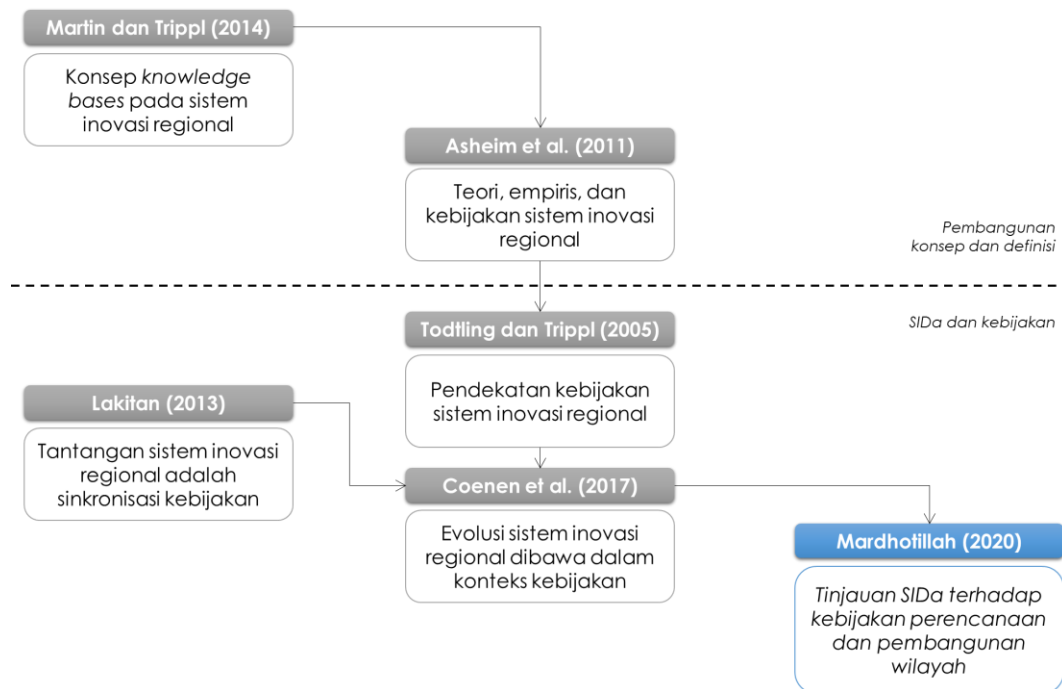
TABEL I. 1
KEASLIAN PENELITIAN

No	Judul	Nama Penulis	Sasaran Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Connecting all the dots: Identifying the “actor level” challenges in establishing effective innovation system in Indonesia</i>	Lakitan (2013)	Menguraikan tantangan pengembangan sistem inovasi daerah di Indonesia.	Metodologi analisis konseptual berdasarkan metodologi kualitatif dan kuantitatif yang dikemukakan oleh Furner (2004). Memanfaatkan data survei tentang kegiatan litbang dan inovasi di lembaga litbang publik oleh Kementerian Riset dan Teknologi (RISTEK), Republik Indonesia pada tahun 2011.	<ul style="list-style-type: none"> • Tantangan berat di tingkat ekosistem adalah menyelaraskan semua peraturan dan kebijakan publik sedemikian rupa sehingga lebih mendukung pengembangan sistem inovasi; dan untuk menyinkronkan program dan kegiatan yang diprioritaskan dari semua lembaga publik dan swasta terkait. • Kolaborasi ilmiah antar pengembang teknologi rendah; karena itu, dapat menyebabkan penggunaan anggaran litbang nasional yang tidak efisien. Aktivitas litbang internal dan daya serap teknologi industri dalam negeri juga rendah. Akhirnya, peran agen perantara belum signifikan.
2.	<i>Regional Innovation Systems: Theory, Empirics and Policy</i>	Asheim, Smith, et al. (2011)	Mengeksplorasi elemen dan karakteristik yang menjadi contoh pendekatan sistem inovasi regional.	Penelitian dilakukan dengan metode eksplorasi literatur.	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan pemahaman rinci tentang efektivitas sistem inovasi regional dan basis pengetahuan regional untuk membangun keunggulan kompetitif dengan menggunakan varietas terkait; • Memahami peran batas sistem, ruang kognitif dan heterogenitas pengetahuan

No	Judul	Nama Penulis	Sasaran Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					<p>dalam membentuk transfer pengetahuan yang membuka potensi untuk mengintegrasikan inisiatif kebijakan nasional dan regional; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungkan dan juga menggabungkan kebijakan inovasi dengan pendidikan dan proses dan kebijakan tenaga kerja.
3.	<i>Advancing regional innovation systems: What does evolutionary economic geography bring to the policy table?</i>	Coenen et al. (2017)	Menyelidiki secara kritis apa yang dibawa oleh geografi ekonomi evolusioner ke dalam tabel kebijakan, dan bagaimana hal ini berpotensi memajukan pendekatan sistem inovasi regional untuk meningkatkan kapasitas kebijakan berdasarkan kerangka kerja sistem inovasi regional.	Penelitian dilakukan dengan metode eksplorasi literatur.	<p>Pemahaman tentang sistem inovasi regional dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gagasan RIS harus semakin menggabungkan gagasan dasar evolusi bahwa sumber daya kognitif yang diciptakan sebagai eksternalitas dari konfigurasi industri regional yang ada mengkondisikan pengembangan industri. • Proses dalam RIS harus dilihat dalam kaitannya dengan pengetahuan yang tersedia untuk masing-masing perusahaan dan sebagai refleksi dari struktur industri regional. • Dalam kaitannya dengan batas-batas sistem, kebijakan RIS harus memberikan titik kontak ke jaringan ekstra-regional yang saling melengkapi untuk memperluas dan membangkitkan pengetahuan di dalam sistem.
4..	<i>System Failures, Knowledge Bases and Regional Innovation Policies</i>	Martin dan Trippl (2014)	Menguraikan implikasi kebijakan yang berasal dari konsep-konsep sistem inovasi regional	Penelitian dilakukan dengan metode eksplorasi literatur.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan inovasi regional yang dibuat khusus harus mempertimbangkan pengaturan kelembagaan dan basis pengetahuan spesifik kawasan.

No	Judul	Nama Penulis	Sasaran Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	<i>One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach</i>	Tödtling dan Trippel (2005)	Menganalisis berbagai jenis wilayah dengan memperhatikan prakondisi mereka untuk inovasi, jaringan, dan hambatan inovasi.	Penelitian dilakukan dengan metode eksplorasi literatur.	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian bagaimana kerangka terpadu dapat menginformasikan kebijakan inovasi regional yang sesuai. • Diperlukan pendekatan kebijakan inovasi yang berbeda untuk setiap wilayah: di wilayah periferi, tantangan utamanya adalah memperkuat dan meningkatkan ekonomi regional dengan mendorong “<i>catching up learning</i>”, karena tingkat penelitian dan pengembangan terlebih inovasi masih berada di level rendah. • Kapasitas inovatif yang lemah dari berbagai jenis wilayah yang masalah, kemungkinan berasal dari tanggapan kebijakan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi kebijakan itu penting untuk menciptakan kebijakan inovasi yang menarik inspirasi dari sistem inovasi regional yang ideal.

Sumber: Analisis Penyusun, 2020



Sumber: Analisis Penyusun, 2020

Keterangan:

- Peneliti terdahulu
- Penelitian penyusun

GAMBAR 1.2
POSISI PENELITIAN BERDASARKAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu terkait dengan sistem inovasi daerah atau yang sering disebut sebagai *Regional Innovation System* sangat beragam. Berdasarkan skema di atas, literatur yang digunakan terkait dua hal yaitu pembangunan konsep sistem inovasi dan keterkaitan sistem inovasi daerah dengan kebijakan. Posisi penelitian terletak pada bagian setelah adanya penelitian terdahulu tentang keterkaitan sistem inovasi daerah dengan kebijakan, karena salah satu tantangan terbesar implementasi sistem inovasi daerah terletak pada sinkronisasi kebijakan. Kemudian terdapat penelitian tentang evolusi sistem inovasi daerah dalam konteks kebijakan. Garis besar penelitian ini yaitu mengenai bagaimana konsep sistem inovasi daerah diakomodasi dalam peraturan perencanaan pembangunan wilayah. Melanjutkan penelitian terdahulu dengan menganalisis dokumen kebijakan sistem inovasi daerah dan kebijakan perencanaan pembangunannya.

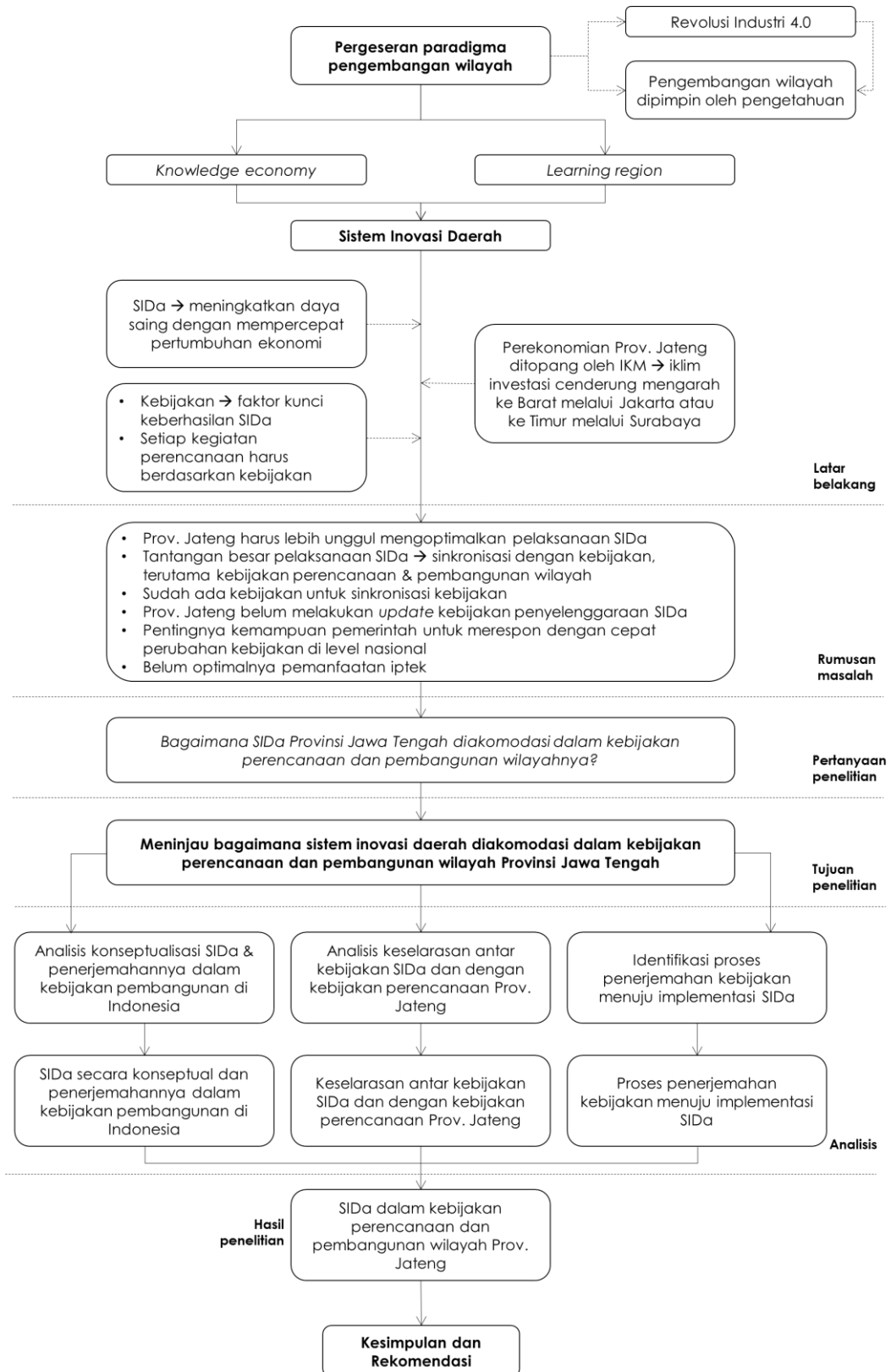
1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

- a. Ilmu pengetahuan, dapat memberikan tambahan informasi keilmuan mengenai sistem inovasi daerah terutama dalam hal seperti apa konsep tersebut diterjemahkan serta diakomodasi dalam peraturan perencanaan dan pembangunan wilayah dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah.
- b. Pemerintah, dapat mengetahui seperti apa sistem inovasi daerah telah diakomodasi dalam peraturan perencanaan dan pembangunan wilayah. Sehingga pemerintah khususnya Provinsi Jawa Tengah dapat menjadikannya bahan evaluasi serta pertimbangan untuk keberlanjutan sistem inovasi daerah yang optimal di masa mendatang.
- c. Masyarakat, dapat mengetahui serta menentukan sikap dalam berkeputusan untuk berpartisipasi dalam upaya pemerintah menjalankan serta mencapai target pembangunan wilayah berbasis inovasi yang pada akhirnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- d. Peneliti, dapat menambah dan memperkaya wawasan dalam ilmu pengetahuan terkait dengan sistem inovasi daerah. Melalui penelitian ini akan didapatkan pengetahuan seperti apa sistem inovasi daerah telah diakomodasi dalam peraturan perencanaan dan pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1.7 Kerangka Pemikiran

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran penelitian yang dikemas secara singkat agar alur penelitian lebih mudah dipahami. Bagan di bawah ini telah dikelompokkan berdasarkan poin penting penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, analisis, hasil penelitian, serta kesimpulan dan rekomendasi.



Sumber : Analisis Penyusun, 2020

**GAMBAR 1. 3
KERANGKA PIKIR**

1.8 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membutuhkan literatur yang cukup luas untuk memahami konsep secara teoritis, merujuk konsep ke dalam kebijakan serta implementasi konsep, dan mempermudah menyimpulkan hasil analisis. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta tujuan sasaran penelitian mengenai konten kebijakan SIDA dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

1.8.1 Data yang Digunakan

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian berupa dokumen baik dokumen kebijakan maupun literatur. Sehingga seluruh data penelitian diperoleh dengan teknik pengumpulan data sekunder yaitu telaah dokumen. Dokumen-dokumen kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen kebijakan SIDA yang diterapkan di level nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:

- a. UU No. 18 Tahun 2002 tentang SINas Litbangrap Iptek
- b. UU No. 11 Tahun 2019 tentang SINas Litbangrap Iptek
- c. Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 3 dan 36 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah
- d. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Serta kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Sementara literatur yang digunakan sebagai bahan analisis penelitian ini yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan *knowledge economy*, *learning region*, sistem inovasi daerah, sedikit mengenai evaluasi kebijakan publik, serta teori pembangunan wilayah.

1.8.2 Metode Analisis

Terdapat tiga hal yang akan dijelaskan dalam metode analisis yaitu mengenai teknik analisis, tahapan analisis, serta kerangka analisis sebagai berikut:

a. Teknik Analisis

Berikut ini penjelasan masing-masing teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian:

- Analisis Konseptual

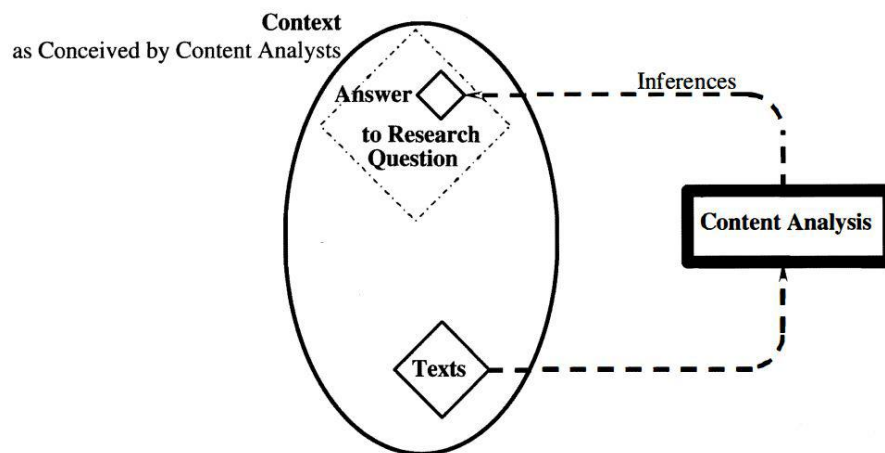
Analisis konseptual adalah teknik yang dengan tepat mendefinisikan makna konsep yang diberikan dengan mengidentifikasi dan menentukan kondisi di mana entitas atau fenomena apa pun dapat diklasifikasikan dalam konsep tersebut. Tujuan analisis konseptual yaitu digunakan sebagai metode penyelidikan ke bidang minat tertentu. Selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman kita tentang cara-cara di mana konsep-konsep tertentu dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide-ide tentang bidang itu (Furner, 2004).

Dua asumsi yang mendasari ekspektasi positif kegunaan analisis konseptual adalah (i) keyakinan bahwa paling tidak mungkin bagi pengguna konsep untuk mencapai beberapa tingkat kesepakatan atau kesepahaman mengenai sifat penggunaan konsep dan ke mana konsep diletakkan, dan (ii) keyakinan bahwa untuk mencapai kesepakatan semacam itu merupakan prasyarat untuk pengembangan pengetahuan yang berguna (dan/ atau menarik). Analisis konseptual merupakan salah satu metode untuk menjelaskan atau membangun evolusi dalam pengarsipan suatu konsep. Karena pada dasarnya teknik analisis ini dilakukan dengan eksplorasi teori yang mengarah pada konsep tertentu yang dikaitkan dengan fakta atau kejadian riil yang terus berkembang.

- Analisis Isi

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis isi yaitu teknik yang bisa digunakan untuk membuat replikasi dan kesimpulan yang *valid* dari dokumen untuk menciptakan sebuah konteks yang dibutuhkan. Analisis ini merupakan bagian dari pendekatan kualitatif terhadap analisis isi berakar pada teori sastra, ilmu sosial (interaksionisme simbolik, etnometodologi), dan keilmuan kritis (pendekatan Marxis, kajian budaya

Inggris, teori feminis). Terkadang mereka diberi label penafsiran. Karakteristik pendekatan kualitatifnya adalah a) Membutuhkan pembacaan yang cermat dari sejumlah kecil materi teks b) Melibatkan *rearticulation* (interpretasi) dari teks-teks yang diberikan ke dalam narasi baru (analitis, dekonstruktif, emansipatoris, atau kritis) yang diterima dalam komunitas ilmiah tertentu, dan c) Para analis bekerja dalam lingkaran *hermeneutik* di mana pemahaman mereka dikondisikan secara sosial atau budaya secara konstitutif berpartisipasi. Untuk alasan ini, pendekatan ini disebut sebagai metode interaktif, deskripsi yang berbicara tentang proses terlibat dalam interpretasi teks.



Sumber: Krippendorff, 2004

GAMBAR 1. 4
SKEMA ANALISIS ISI MENJAWAB PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa analisis isi mampu menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan konteks suatu teks dengan membuat kesimpulan dari teks tersebut. Ringkasnya, dengan konten analisis ini bisa kita gunakan sebagai metode untuk menyimpulkan semua jenis teks, gambar, simbol, maupun data lainnya (Krippendorff, 2004).

- Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan hasil dari kompilasi data. Analisis deskriptif ini dapat menjelaskan hasil akhir dari analisis isi dan analisis

konseptual agar lebih mudah untuk dipahami. Hasil akhir dari analisis ini bisa disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau modifikasi lainnya.

b. Tahapan Analisis

Analisis dilakukan secara bertahap sesuai dengan sasaran penelitian. Uraian tahapan analisis akan diperjelas dalam tabel kerangka desain penelitian berikut ini:

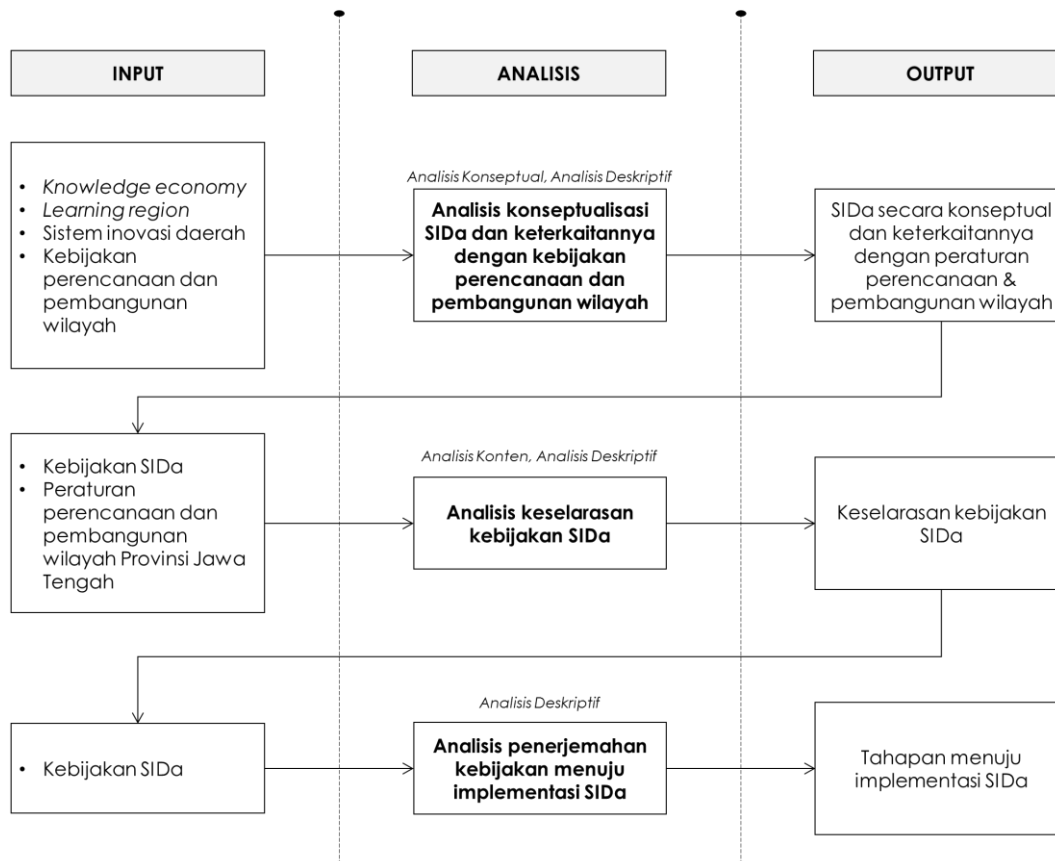
TABEL I. 2
KERANGKA DESAIN PENELITIAN

Tujuan: Mengetahui bagaimana sistem inovasi daerah diakomodasi dalam peraturan perencanaan dan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.			
	Sasaran 1	Sasaran 2	Sasaran 3
Sasaran	Mengidentifikasi konseptualisasi SIDA dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah di Indonesia.	Menganalisis keselarasan antar kebijakan SIDA dan dengan kebijakan perencanaan dan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah.	Mengidentifikasi penerjemahan kebijakan menuju implementasi SIDA di Provinsi Jawa Tengah.
Definisi	Menjelaskan secara konsep SIDA melalui teori yang mendasari munculnya SIDA yaitu <i>knowledge economy</i> dan <i>learning region</i> kemudian mengidentifikasi keterkaitan konsep ini dengan peraturan perencanaan dan pembangunan di Indonesia.	Menguraikan keselarasan kebijakan SIDA baik secara vertikal (dengan RPJMD) maupun secara horizontal (antar kebijakan SIDA). Keselarasan yang dimaksud di sini adalah keselarasan yang diidentifikasi dari keterpaduan konten kebijakannya, apakah ada kesamaan, perbedaan, atau keterhubungan antar kebijakan yang menunjukkan alur tertentu.	Menjelaskan bagaimana proses dari penerjemahan SIDA sampai dengan penerapan SIDA oleh pemerintah. Bagian ini juga mengidentifikasi permasalahan serta pendekatan kebijakan SIDA Provinsi Jawa Tengah sebagai ujung tujuan penelitian.
Teknik Analisis	Analisis Konseptual, Analisis Deskriptif	Analisis Isi, Analisis Deskriptif	Analisis Deskriptif
Teknik Pengumpulan Data	Telaah Dokumen	Telaah Dokumen	Telaah Dokumen

Sumber: Analisis Penyusun, 2019

c. Kerangka Analisis

Bagan kerangka analisis bertujuan untuk memperjelas alur analisis setiap sasaran penelitian dikelompokkan menjadi tiga yaitu input yang dianalisis, analisis yang dilakukan, dan hasil analisis. Berikut ini alur analisis yang dilakukan dalam penelitian:



Sumber: Analisis Penyusun, 2020

Keterangan:

INPUT = poin-poin penting yang dianalisis/ di-review

ANALISIS = analisis yang dilakukan

OUTPUT = hasil analisis

GAMBAR 1. 5
KERANGKA ANALISIS PENELITIAN

1.9 Sistematika Penulisan

Proposal penelitian tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup wilayah dan materi penelitian, keaslian penelitian, kerangka pikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR SISTEM INOVASI DAERAH

Berisi mengenai kajian literatur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu terkait dengan sistem inovasi daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBIJAKAN SISTEM INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Berisi mengenai gambaran umum wilayah serta beberapa hal yang terkait dengan sistem inovasi daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV ANALISIS ISI SISTEM INOVASI DAERAH DALAM KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Secara garis besar memuat konseptualisasi SIDA berdasarkan kebijakan, analisis isi SIDA dalam perspektif kebijakan SIDA dan kebijakan perencanaan wilayah, dan penerjemahan kebijakan SIDA menuju implementasi SIDA di Provinsi Jawa Tengah.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan.